

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT 2 TENTANG MENYALAKAN LAMPU
DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh :
DEDY IRWANTO
NPM : 0971010040

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN
LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN
SIDOARJO

Disusun Oleh :

DEDY IRWANTO
NPM. 0971010040

Telah disetujui untuk mengikuti ujian oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur

PEMBIMBING

MAS ANIENDA TF, SH, MH
NPT. 3 7709 07 0223

Menyetujui

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO.SH.MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN
LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN
SIDOARJO

Disusun Oleh :

DEDY IRWANTO
NPM. 0971010040

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juli 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

MAS ANIENDA TF.SH.MH
NPT. 3 77009 07 0223

1. Dr.H.SUTRISNO,SH.,M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2. YANA INDAWATI,SH,MKn
NPT. 3 7901 070224

3. FAUZUL ALIWARMAN,SH,M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH.MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN
LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN
SIDOARJO

Disusun Oleh :

DEDY IRWANTO
NPM. 0971010040

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur
Pada tanggal 19 Agustus 2014

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

MAS ANIENDA TF.SH.MH
NPT. 3 77009 07 0223

1. Dr.H.SUTRISNO,SH.,M.Hum
NPT. 19601212 198803 1 001

2. YANA INDAWATI,SH,MKn
NPT. 3 7901 070224

3. FAUZUL ALIWARMAN,SH,M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH.MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY IRWANTO
Tempat/tanggal lahir : SURABAYA, 10 DESEMBER 1990
NPM : 0971010040
Konsentrasi : PIDANA
Alamat : Mrutu Kalianyar 1/9

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“EFEKTIFITAS PASAL 107 TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG
HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO” dalam rangka memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya
cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Juli 2014

Mengetahui
Pembimbing

Penulis

MAS ANIENDATE.SH.MH
NPT.3 7709 07 0223

DEDY IRWANTO
NPM. 0971010040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan nabi Muhammad saw sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul : EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT 2 TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dimana untuk dapat menambah pengetahuan dan lebih mengerti akan teori-teori hukum di lapangan.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro,S.H,MM selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.
3. Bapak Sigit Dwi Nugroho,Msi selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda TF., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang penulis hormati yang tidak pernah lelah untuk membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Kapolsek Tulangan Sidoarjo yang memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di kantor tersebut
7. Para anggota polisi Polsek Tulangan Sidoarjo yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Buat keluarga yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Untuk teman-teman kampus yang telah memberi semangat dan motivasi
13. Buat Indah Anggraini yang selalu menemani dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

14. Buat teman rumah yang selalu mendorong untuk bisa terselesaikannya skripsi ini

15. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca, walaupun proposal skripsi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penulis mohon untuk saran dan kritiknya.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	
1.5.1 Tinjauan Umum UU no 22 tahun 2009	
1.5.1.1 Latar Belakang Lahirnya UU no 22 tahun 2009	8
1.5.1.2 Mengenal Pasal 107 UU no 22 tahun 2009	13
1.5.1.3 Pengertian Lampu	14
1.5.1.4 Sepeda Motor dan Pengemudi Motor	15
1.5.1.5 Siang Hari	16
1.5.1.6 Pengertian tindak pidana	16

1.5.2	Teori Efektifitas Hukum	
1.5.2.1	Efektifitas hukum	17
1.5.2.2	Kepatuhan	24
1.6	Metode Penelitian	
1.6.1	Pendekatan Masalah	25
1.6.2	Sumber Data Atau Bahan Hukum	26
1.6.3	Metode Pengumpulan Data	27
1.6.4	Metode Analisis Data	29
1.6.5	Sistematika Penulisan	31
 BAB II PENERAPAN PASAL 107 AYAT 2 UU NO 22 TAHUN 2009		
2.1	Gambaran Umum Penerapan Pasal 107 ayat 2	
	UU No 22 tahun 2009	33
2.2	Analisa Penerapan Efektifitas Pasal 107 ayat 2	
	UU No 22 tahun 2009	43
 BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 107 AYAT 2 UU NO 22 TAHUN 2009		
3.1	Sanksi pelanggar Pasal 107 ayat 2 UU no 22 tahun 2009	50
3.2	Analisa penerapan sanksi bagi pelanggar Pasal 107 ayat 2 UU No 22 tahun 2009	52
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN		

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama mahasiswa : Dedy Irwanto
NPM : 0971010040
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Desember 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

EFEKTIFITAS PASAL 107 TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI
SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN
UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 107 ayat (2) tentang menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor dan penerapan sanksi bagi pelanggar pasal 107 ayat (2) berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai tingkat kepatuhan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari seperti yang telah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 107 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang efektif dilaksanakan di kawasan Polsek Tulangan Sidoarjo karena masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini. Penerapan sanksi Pasal 107 ayat 2 di Polsek Tulangan masih kurang efektif karena aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut.

Kata Kunci : angkutan jalan, pengendara, sepeda motor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan.

Tentunya sebagai pengendara motor atau pengguna jalan ingin perjalanannya lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar mengurangi kemacetan dan juga memperkecil angka kecelakaan di jalan. Pada tahun 2009, DPR RI mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU lalu lintas dan angkutan jalan). Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor

khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat¹.

UU lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah revisi penyempurna agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan dijalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. Siapapun mereka tidak terkecuali, selama berada dijalan raya tidak sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya Undang-undang ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan merata serta dapat diketahui oleh pengendara sepeda motor yang merupakan bagian dari lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat

¹ Iskandar, http://mediaindonesia.com/webtorial/ycab_old/?ar_id=NTU4, diakses pada tanggal 10 Desember 2013, 18-30WIB.

yaitu Pasal 107 ayat 2. Di dalam Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan di berlakukannya UU lalu lintas dan angkutan khususnya Pasal 107 ayat 2 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari. Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 107 ayat 2 UU lalu lintas dan angkutan jalan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari mengundang kontroversi dikalangan masyarakat. Ada masyarakat yang pro terhadap kebijakan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari dan ada juga masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu di siang hari sesuai dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, antara lain :

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak terhalang kendaraan di depannya, baik dengan cara menyalip kendaraan di depannya atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki menjadi ketakutan.
2. Mematikan atau tidak memfungsikan dengan sengaja lampu motor, baik lampu utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini akan sangat membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya.

3. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan dapat membuat cipratan banyak ke kendaraan lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain.

Sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak dijalanan oleh petugas polisi, tetapi sayangnya para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri jarang dilakukan pengecekan. Seharusnya masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu ada sanksinya. Salah satu peraturan yang diatur dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal tersebut adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan

sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan².

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan UU lalu lintas dan angkutan jalan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo.

² Soekanto Soerdjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 (selanjutnya disingkat Soekanto I), Hal 26

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana pelanggaran atau lebih spesifiknya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya untuk Pasal 107 ayat (2).

b. Bagi Polisi

Dapat memberi solusi penanganan pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah menemukan solusi sebagai pencegahan pelanggaran terhadap Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan di masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum UU No 22 tahun 2009

1.5.1.1 Latar Belakang Lahirnya UU No 22 Tahun 2009

Lahirnya UU No 22 tahun 2009 adalah sebagai pengganti dari UU No 14 Tahun 1992. Hal yang menjadi latar belakang lahirnya undang – undang ini adalah bahwasanya UU No 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi masyarakat Indonesia, dimana perkembangan masyarakat lebih cepat dibanding dengan perkembangan hukum sehingga yang terjadi adalah bahwa undang – undang No 14 Tahun 1992 tidak mampu merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat dan tidak mampu memberikan efek manfaat yang optimal mengenai penegakan hukum dalam lalu lintas di Indonesia³.

Hal yang membedakan UU lalu lintas dan angkutan jalan dengan undang–undang No 14 Tahun 1992 adalah dimasukkannya Bab tentang penyelenggaraan, jaringan lalu lintas dan jalan, keamanan dan keselamatan, pengembangan industri dan teknologi sarana, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus (penyandang cacat, manula, anak-anak, wanita hamil,

³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal 15

dan orang sakit), sistem informasi, sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat. Beberapa poin kelemahan pada UU No 14 tahun 1992 sebelum disempurnakan di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya yaitu, pembagian wewenang pembinaan tugas dan tanggung jawab yang tidak terlaksana secara optimal, juga hal-hal yang bersifat teknis operasional masih diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan pada UU lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian tegas dalam pengaturannya.

Dalam UU No 14 Tahun 2009 juga tidak dijelaskan mengenai pembagian wewenang setiap instansi, pasalnya masih terjadi tumpang tindih antara Polri dan PPNS dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tidak terdapat kepastian. Dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan tugas lalu lintas jelas dipegang oleh polisi, sementara untuk lalu lintas dan angkutan jalan hanya berada di terminal dan jembatan timbang dan tidak berhak untuk melakukan penilangan, juga tugas-tugas pokok instansi dalam membidangi lalu lintas. Kejelasan pembagian wewenang (otonomi), keterbukaan informasi (transparansi), maka tak ada suatu keraguan bahwa sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial⁴.

⁴ SoekantoI, Op.cit., Hal 170

Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas (akuntabilitas), partisipasi masyarakat (demokrasi), perlindungan dan keadilan (hak asasi), manajemen keselamatan dan optimalisasi sistem transportasi jalan (efisiensi) telah diatur dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan Tugas Polri yaitu, bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, dan manajemen operasional serta pendidikan berlalu lintas. Hal yang menjadi latar belakang lainnya adalah , adanya ketidak sesuaian kondisi saat ini, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan saat ini, sehingga perlu adanya pergantian UU yang lama ke yang baru.

UU ini dinilai lebih lengkap karena memiliki 22 Bab dan 326 pasal. Sedangkan undang - undang 14 tahun 1992 yang selama ini digunakan hanya memiliki 16 Bab dan 74 pasal. Berkaitan dengan perlakuan khusus (Bab XV) dinyatakan meliputi antara lain: aksesibilitas, prioritas, dan fasilitas pelayanan yang mana hal tersebut memungkinkan terjadinya gugatan kelompok bila tidak dipenuhi. Sedangkan peran serta masyarakat (Bab XVIII) berupa :

1. pemantauan, dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan agar terjadi penyempurnaan.
3. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi Pembina dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak pada lingkungan.
4. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan⁵

Beberapa poin penting diantaranya tercantum pada pasal 59 tentang lampu isyarat, di sini dijelaskan lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas polri, warna merah digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan TNI, Pemadam kebakaran, Ambulan, Palang merah dan Jenazah. Sedangkan warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus,” yang selama ini ketentuan masalah sirene tidak pernah diatur.

Pada Pasal 107 ayat (2) menyebutkan wajib menyalakan lampu pada siang hari. Pada UU No 14 Tahun 1992 tidak diatur mengenai menghidupkan lampu pada siang hari namun pada UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur hal tersebut. Hal yang

⁵ Notoatmojo Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Pengendara, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal 33

menjadi latar belakang lahirnya pasal ini adalah melihat banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, melalui sebuah uji sosiologis beberapa bulan di Surabaya dengan menghidupkan lampu pada siang hari ternyata menunjukan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Menghidupkan lampu pada siang hari dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas karena dengan menghidupkan lampu pada siang hari membuat setiap pengendara motor mengetahui bahwa dari jarak sekian meter terdapat pengendara lain sehingga tabrakan secara frontal dapat ditekan sekecil mungkin dan ketika pengendara ingin membelok ke arah kiri atau kanan maka dengan bantuan kaca spion dapat mengetahui adanya cahaya motor pengendara lain di belakang sehingga tabrakan pada saat membelok dapat dihindari⁶. Diharapkan dengan terbitnya UU lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan para penegak hukum terkait masalah lalu lintas dan angkutan jalan⁷.

1.5.1.2 Mengenal Pasal 107 UU No 22 Tahun 2009

⁶ Berkendara dengan aman, <http://www.hidupaman.com/index.php/uu-no-22-tahun-2009-tentang-lalu-2.html>, diakses pada hari senin tanggal 2 Desember 2013, 19.00 WIB

⁷ Legal Articles, Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum, http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=13, diakses pada hari senin tanggal 2 Desember 2013, 20.30 WIB

Pasal 107 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa :

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

penjelasan mengenai Pasal 107 ayat (1) UU lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat, terowongan, dan kabut. Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa tidak semua kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu kendaraannya di siang hari, atau yang lebih dikenal dengan istilah Daytime Running Lights ("DRL"). Kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari itu terletak pada pengemudi sepeda motor saja. Akan tetapi, kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan ada pada setiap pengemudi kendaraan bermotor di siang hari jika pada siang hari tersebut cuaca gelap, hujan lebat, saat menyusuri terowongan, atau berkabut. Selain mematuhi ketentuan tersebut, khusus untuk

pengemudi sepeda motor, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari⁸.

Sanksi pidana bagi mereka yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) UU lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Pasal 293 ayat (1) UU lalu lintas dan angkutan jalan adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ berdasarkan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ adalah pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

1.5.1.3 Lampu

Pengertian lampu adalah alat yang digunakan untuk menerangi. Lampu utama pada sepeda motor adalah lampu yang ada pada sepeda motor yang mempunyai fungsi khusus untuk menerangi ketika motor digunakan⁹. Lampu sepeda motor berada di depan berwarna putih dan/atau kuning. Selain lampu

⁸ Menyalakan lampu siang hari. <http://www.tmcmetro.com/news/2012/05/siang-hari-sepeda-motor-wajib-nyalakan-lampu-utama>, diakses pada Rabu 4 Desember 2013, 19.10 WIB

⁹ lampu. <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/10/menyalakan-lampu-kendaraan-di-siang-hari-417610>, diakses pada Kamis 05 Desember 2013, 19-30 WIB

sebagai alat penerang, lampu juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama pemakai jalan. Menurut UU lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

1.5.1.4 Sepeda Motor dan Pengemudi Motor

Menurut Pasal 1 butir (20) UU Lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dan yang dimaksud sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, penggunaan bahan bakarnya rendah dan biaya operasionalnya juga murah.

Ketertiban dalam berlalu lintas di jalan merupakan kewajiban setiap pengguna jalan dengan tujuan untuk keamanan dan keselamatan lalu lintas. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang

dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sedangkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

1.5.1.5 Siang Hari

Yang dimaksud siang hari menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bagian hari yang terang yaitu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Saat siang hari yang sangat terang, membuat mata kita seakan terbiasa melihat benda-benda disekitar (jalanan, trotoar, pohon dan sebagainya). Ketika kita melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian kita mengarah ke cahaya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa DRL perlu dilaksanakan.

1.5.1.6 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum,

dilakukan dengan kesalahan dan orang yang mampu bertanggung jawab.

1.5.2 Teori Efektifitas Hukum

1.5.2.1 Efektifitas Hukum

Hukum bisa dikatakan efektif apabila dilaksanakan dan di patuhi oleh seluruh masyarakat. Menurut Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum¹⁰. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri
- b. Penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan¹¹

¹⁰ Pasamai Syamsuddin, Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 112

¹¹ Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 (selanjutnya disingkat Soekanto II, Hal 87

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Didalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin ketik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang,

kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

1.5.2.2 Kepatuhan

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar internasional yang diterbitkan oleh ISO ataupun aturan-aturan nasional seperti UU lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu aturan tersebut adalah mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu disiang hari yaitu pada pasal 107 ayat (2). Apabila para pengendara tersebut mengikuti hukum yang diatur dengan jelas di UU lalu lintas dan angkutan jalan maka pengendara tersebut bisa dianggap patuh.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Sebelum menguraikan Pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penyusun mengemukakan bahwa metodologi dapat diartikan sebagai logika dari arti penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Metode penelitian pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan, dan dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian¹².

1.6.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (yuridis empiris) berupa penulisan, penelitian untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai tingkat kepatuhan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari seperti yang telah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 (selanjutnya disingkat Soekanto III), hal 7.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian¹³.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data primer menjadi sumber data wajib yang harus ada dalam kajian ilmiah karena berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Penulis memperoleh data melalui cara wawancara terstruktur, kuesioner dan lain-lain.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut telah tersedia. Data sekunder dibagi atas 3 macam yaitu :

¹³ Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Karya, Bandung, 2006

1. bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, questioner dan lain-lain.

2. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁴. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

¹⁴ Soekanto III, Op.cit., hal 52.

1.6.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi penelitian wawancara, studi kepustakaan dan kuisioner. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut pengertiannya wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan dan/atau responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pengendara sepeda motor yang melintas di sepanjang Jalan Tulangan dan aparat penegak hukum yaitu polisi di beberapa pos polisi daerah tulangan tentang pelaksanaan Pasal 107 ayat (2) mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari.

b. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian¹⁵.

Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku

¹⁵ Ibid.

ilmun hukum, akan tetapi juga melibatkan aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi maupun berupa catatan.

Dalam hal ini Penulis melakukan dokumentasi berupa surat-surat atau laporan-laporan tertulis tentang tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengendara sepeda motor yang melintas di daerah tulangan yang telah melakukan pelanggaran yaitu tidak menyalakan lampu utama motor di siang hari

c. Kuisisioner (daftar pertanyaan)

Pengumpulan data melalui metode kuisisioner, dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara kuisisioner diberikan langsung kepada responden yaitu beberapa warga pengguna sepeda motor dan petugas polisi yang berjaga di pos polisi di wilayah Tulangan Sidoarjo, dengan harapan setelah diisi/dijawab langsung dikembalikan kepada peneliti. Kuisisioner dapat diserahkan kepada responden dengan cara mendatangi masing-masing responden agar mengisinya¹⁶.

1.6.4 Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang pelanggar peraturan perundang-undangan no 22 tahun 2009

¹⁶ Bambang Waluyo, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 54

Pasal 107 mengenai menyalakan lampu disiang hari, Pada analisis data, tema dan hipotesa dapat lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber yang ada¹⁷. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

Langkah awal penulis yaitu melakukan pengumpulan data baik dilapangan maupun studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing (memperbaiki)

Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, ke semuanya ini merupakan kegiatan editing.

b. Coding

Coding adalah pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit lazim disebut coding. Kode-kode yang diberikan pada kategori jawaban berbentuk angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya) sesuai macamnya. Pemberian kode

¹⁷ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Cetakan VI, Jakarta, 2010, Hal 66

dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel¹⁸.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Ada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab Kesatu, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai penerapan Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan tentang menyalakan lampu disiang hari di wilayah polsek Tulangan Sidoarjo. Dalam bab kedua ini terdiri atas dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai gambaran umum penerapan Pasal 107 ayat (2) UU No lalu lintas dan angkutan jalan, sub bab kedua membahas mengenai analisa efektifitas Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Tulangan Sidoarjo.

¹⁸ Bambang Waluyo, Op.cit., Hal 72

Bab ketiga, membahas mengenai penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Tulangan Sidoarjo tentang menyalakan lampu disiang hari bagi pengendara sepeda motor. Dalam bab ketiga ini terdiri atas dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai sanksi pelanggar pasal 107 ayat (2) UU lalu lintas dan angkutan jalan, sub bab kedua membahas mengenai analisa penerapan sanksi bagi pelanggar pasal 107 UU lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Tulangan Sidoarjo.

Bab keempat merupakan bab penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.